

ISSN: 2087-7900

● JURNAL  
**POLITICA**

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 9 NO.2, NOVEMBER 2018

**Penanggung Jawab:**

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

**Pemimpin Redaksi:**

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

**Dewan Redaksi:**

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)

Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. (Komunikasi Politik)

**Pelaksana Redaksi:**

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.

Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Siti Chaerani Dewanti.,Ars., M.Si

Aulia Fitri., S.IP., M.Si (Han)

**Staff Redaksi:**

Sri Rejeki, S.E., Yeti Ifana, S.E., Supriyanto

**Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Vedi R. Hadiz (University of Melbourne)

Prof. PD. Dr. Patrick Ziegenhain (University of Malaya)

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum (Universitas Indonesia)

Dr. phil. Yandri Kurniawan (Universitas Indonesia)

Dr. Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si (Universitas Indonesia)

Iis Gindarsah, M.Si (CSIS)

**Alamat Redaksi/Tata Usaha:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I, Lt. 2

Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270

Telp: 021-5755987 Fax: 021-5756067

Email: [jurnal.politica@dpr.go.id](mailto:jurnal.politica@dpr.go.id)

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.  
Naskah diketik sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang  
(Lihat pedoman penulisan)

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i
● BANGKITNYA POPULISME GLOBAL, BERBAHAYA DI SANA, MEMATIKAN DI SINI <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i> .....	91-116
● DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN ISU ROHINGYA <i>oleh: Simela Victor Muhamad</i> .....	117-136
● PENGARUH KEBANGKITAN POLITIK IDENTITAS ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT ISU ROHINGYA <i>oleh: Prawita Meidi Handayani</i> .....	137-155
● MANAJEMEN IDENTITAS ETHNOPOLITICAL INDONESIA (STUDI KASUS : BOM GEREJA OIKUMENE, SAMARINDA) <i>oleh: Rahmah Daniah dan Frisca Alexandra</i> .....	157-180
● KEKUATAN DAN KELEMAHAN POLITIK JOKOWI DALAM MENGHADAPI PILPRES 2019 <i>oleh: Aryojati Ardipandanto</i> .....	181-203

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Politica* hadir diterbitkan kedua Tahun 2018, melalui Volume 9 Nomor 2, November 2018. Jurnal *Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan atau ide-ide yang bisa digunakan sebagai sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang. Jurnal *Politica* merupakan tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Edisi kali ini kembali menyajikan 5 (lima) tulisan yang mengkaji beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam oleh beberapa penulis tentang isu nasional dan internasional, yaitu : Bangkitnya Populisme Global, Berbahaya di Sana, Mematikan di Sini; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Isu Rohingya; Manajemen Identitas Ethnopolitical Indonesia (Studi Kasus : Bom Gereja Oikumene, Samarinda); Pengaruh Kebangkitan Politik Identitas Islam Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Isu Rohingya; Kekuatan Dan Kelemahan Politik Jokowi Dalam Menghadapi Pilpres 2019.

Tulisan pertama di jurnal *Politica* berjudul “Bangkitnya Populisme Global, Berbahaya di Sana, Mematikan di Sini” ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Tulisan ini membuka wawasan kita tentang bermunculannya pemimpin populis. Memburuknya ekonomi nasional dan kesejahteraan publik, serbuan masif kaum imigran untuk mencari suaka, dan suburnya pertumbuhan agama para pendatang telah membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya para pemimpin populis baru untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan mesin demokrasi nasional. Analisis dalam tulisan ini akan mengungkap arah perkembangan populisme global dan kemungkinan konsekuensinya bangkitnya populisme di banyak negara merefleksikan pandangan dan kepentingan masyarakat ataukah kaum elit, serta apakah perkembangan ini bersifat sementara atau jangka panjang.

Tulisan kedua ditulis oleh Simela Victor Muhamad dengan judul “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Isu Rohingya”. Isu Rohingya bagi DPR RI tidak saja menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah menjadi persoalan kawasan, bahkan internasional. Hal tersebut terlihat dari arus pengungsi Rohingya di kawasan yang telah menjadi beban bagi sejumlah negara Asia Tenggara dan dibentuknya Tim Pencari Fakta PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. Peran DPR RI, sebagai salah satu aktor internasional, melalui diplomasi parlemen diperlukan untuk memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya, dan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Myanmar dan juga di Kawasan Asia Tenggara.

Tulisan ketiga masih tentang isu Rohingya berjudul “Pengaruh Kebangkitan Politik Identitas Islam Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Isu Rohingya” ditulis oleh Prawita Meidi Handayani. Kebangkitan politik identitas dikatakan banyak berpengaruh terhadap politik dalam negeri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bangkitnya politik identitas islam di Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Rohingnya. Pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Rohingya mendorong Indonesia untuk bereaksi terhadap isu tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah melakukan upaya diplomasi terkait

menanganan isu ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok Rohingya dan menampung pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Tulisan keempat berjudul “Manajemen Identitas Ethnopolitical Indonesia (Studi Kasus : Bom Gereja Oikumene, Samarinda)” ditulis oleh Rahmah Daniah dan Frisca Alexandra. Merupakan hasil penelitian tentang ancaman terorisme yang terus menuntut perhatian. Aksi terror di gereja Oikumene Samarinda di Kalimantan Timur tahun 2016 muncul diluar dugaan. Masyarakat Kalimantan Timur sangat majemuk dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kota yang cukup ideal. Berdasarkan pendekatan manajemen identitas ethnopolitical penelitian ini menunjukkan pemerintah masih memiliki kendala tinggi dalam penanganan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan social learning theory, munculnya peledakan bom gereja Oikumene disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari masyarakat Sengkotek yang memiliki sikap yang terbuka dan perilaku toleransi yang tinggi terhadap pendatang dikarenakan kondisi budaya heterogen. Lingkungan pemicu konteks juga diakibatkan oleh UU No.015/2003 yang mengatur tindak penangkapan terhadap perilaku terorisme.

Tulisan kelima berjudul “Kekuatan Dan Kelemahan Politik Jokowi Dalam Menghadapi Pilpres 2019” ditulis oleh Aryojati Ardipandanto. Menurut penulis berdasar beberapa survey menjelang Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Tulisan ini mengkaji kekuatan dan kelemahan politik Jokowi dalam konteks menghadapi Pilpres 2019. Kesimpulan kaitan ini adalah bahwa kekuatan politik Jokowi terutama terletak pada aspek political image sebagai pemimpin yang merakyat dan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur.

Demikian pengantar redaksi atas kelima tulisan yang dimuat dalam jurnal Politica edisi kali ini. Redaksi berharap semua tulisan ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat menjadi bahan informasi dan memberikan inspirasi serta alternatif solusi bagi para pengambil keputusan, dan tentunya juga memberi manfaat besar bagi para pembaca.

Jakarta, November 2018

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

### **Bangkitnya Populisme Global, Berbahaya Di Sana, Mematikan Di Sini**

Situasi dunia dewasa ini ditandai dengan bermunculannya pemimpin populis di negara-negara berbagai benua. Mulai dari benua Eropa, Amerika dan Asia, setelah pemilu di Jerman, Filipina, dan Brasil, para pemimpin populis muda memperoleh dukungan politik yang terus meningkat untuk mengendalikan negara dan menjalankan politik dan kebijakan populis mereka. Memburuknya ekonomi nasional dan kesejahteraan publik, serbuan masif kaum imigran untuk mencari suaka, dan suburnya pertumbuhan agama para pendatang telah membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya para pemimpin populis baru untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan mesin demokrasi nasional. Analisis yang komprehensif akan membantu menjelaskan realitas yang berkembang di tingkat global, dengan melakukan pendekatan komparatif terhadap kasus-kasus yang tengah berlangsung. Analisis ini lebih jauh akan mengungkap arah perkembangan populisme global dan kemungkinan konsekuensinya, dan dapat menjelaskan apakah kecenderungan bangkitnya populisme di banyak negara merefleksikan pandangan dan kepentingan masyarakat ataukah kaum elit, serta apakah perkembangan ini bersifat sementara atau jangka panjang.

Kata kunci: populisme, populisme global, pemimpin populis, politik populis, Eropa, ideologi populisme

Poltak Partogi Nainggolan

### *The Rise Of Global Populism, Dangerous There, Deadly Here*

*Today's world situation is marked by the emergence of populist leaders in various countries across continents. From Europe to America and Asia, after elections in Germany, the Philippines and Brazil, young populist leaders have continuously obtained increasing political supports to rule and introduce their populist policies. Weakening national economics and people welfare as well as massive coming of asylum seekers and flourishing religious life of migrants are likely responsible for developing conducive situation for new populist leaders to win elections by using national democratic mechanism. A comprehensive analysis will help explain the reality which is dynamically developing in global level by applying a comparative approach toward cases currently emerged. This analysis will further reveals the trend of global populism and their possible consequences, and, moreover, explain whether the rise of populism in many countries reflects society or elite's views and interests, and will also exist in short or long run.*

*Keywords: populism, global populism, populist leaders, populist politics, Europe, populist ideology*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Simela Victor Muhamad

### **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Isu Rohingya**

Isu Rohingya bagi DPR RI tidak saja menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah menjadi persoalan kawasan, bahkan internasional. Hal tersebut terlihat dari arus pengungsi Rohingya di kawasan yang telah menjadi beban bagi sejumlah negara tetangga, dan dibentuknya Tim Pencari Fakta PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. DPR RI, sebagai salah satu aktor internasional, sudah tentu, tidak boleh tinggal diam menyaksikan krisis kemanusiaan Rohingya, apalagi ASEAN, yang tadinya diharapkan dapat mengatasi persoalan ini, tidak memperlihatkan perannya. DPR RI telah berupaya bersikap kritis, dan melalui diplomasi parlemen, terus menyuarakan pentingnya penanganan isu Rohingya di fora internasional, khususnya fora antarparlemen. Hal itu dilakukan oleh DPR RI dalam kerangka diplomasi kemanusiaan agar penanganan isu Rohingya mendapatkan perhatian internasional. Diplomasi DPR RI ini tidak saja bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya, tetapi juga untuk terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Myanmar dan juga di kawasan.

Kata Kunci: DPR RI, Rohingya, Myanmar, Diplomasi Kemanusiaan, Diplomasi Parlemen, AIPA, IPU

Simela Victor Muhamad

### *The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia And The Rohingya Issue*

*The Rohingya issue for the Indonesian House of Representatives is not only a domestic issue of Myanmar, but has become a regional, even international problem. This can be seen from the flow of Rohingya refugees in the region that has become a burden to a number of neighboring countries, and the establishment of a United Nations Fact Finding Team to investigate alleged crimes against humanity in Rakhine State. The Indonesian House of Representatives, as an international actor, of course, should not be silent to witness the Rohingya humanitarian crisis, moreover ASEAN, which was previously expected to overcome this problem, did not show its role. The Indonesian House of Representatives has tried to be critical, and through parliamentary diplomacy, continues to voice the importance of handling the Rohingya issue in international fora, especially inter-parliamentary fora. This was done by the Indonesian Parliament in the framework of humanitarian diplomacy so that the handling of the Rohingya issue received international attention. This diplomacy is not only intended to provide protection for the human rights of the Rohingya ethnicity, but also to realize security and peace stability in Myanmar and also in the region.*

*Keywords: the Indonesian House of Representatives, Rohingya, Myanmar, Humanitarian Diplomacy, Parliamentary Diplomacy, AIPA, IPU*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prawita Meidi Handayani

### **Pengaruh Kebangkitan Politik Identitas Islam Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Isu Rohingya**

Kebangkitan politik identitas dikatakan banyak berpengaruh terhadap politik dalam negeri, bahkan mempengaruhi Pilkada Jakarta yang lalu. Oleh karena itulah, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bangkitnya politik identitas islam di Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Rohingnya. Pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Rohingnya mendorong Indonesia untuk bereaksi terhadap isu tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah melakukan upaya diplomasi terkait penanganan isu ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok Rohingnya dan menampung pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia.

Kata kunci: Rohingnya, politik islam, kebijakan luar negeri, dan konflik.

Prawita Meidi Handayani

### *To What Extent The Rise Of Islamic Political Identity Influence Indonesian Foreign Policy Regarding The Rohingnya Issue*

*The rise of Islamic identity politics is considered to play a significant role in Indonesia's national politics. It is even said to have played a major role in Jakarta's Gubernatorial election in 2017. Therefore, this paper aims to identify the impact of the rise of Islamic identity politics in Indonesia towards Indonesia's foreign policy, especially on the issue of Rohingnya. Human rights violations in which the Rohingnya Muslim minority group has experienced encourages Indonesia to react to the issue. The Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs, has also made diplomatic efforts to address this issue. In addition, the government also provided assistance to Rohingnya groups and accommodated Rohingnya refugees who came to Indonesia*

*Keywords: Rohingnya, political islam, foreign policy, and conflict.*

Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Rahmah Daniah dan Frisca Alexandra

**Manajemen Identitas Ethnopolitical Indonesia (Studi Kasus : Bom Gereja Oikumene, Samarinda)**

Walapun pihak pemerintah Indonesia merasa telah melewati fase darurat terorisme namun bukan berarti kondisinya benar-benar bebas dari ancaman terorisme, buktinya aksi terror yang diluar dugaan muncul di Kalimantan Timur yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kota yang cukup ideal, yaitu jauh dari ancaman bom, malah terjadi pada November 2016, dimana bom meledakkan gereja Oikumene dan ledakan tersebut menimbulkan korban. Aksi tersebut malah dilakukan oleh mantan narapidana pelaku terror bom buku di Tangerang yang mendapatkan remisi tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan manajemen identitas ethnopolitical pemerintah Indonesia pasca bom gereja Oikumene, Samarinda dengan fokus pada pendekatan pemerintah melalui jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terutama pada pihak-pihak terkait dan telaah dokumen dari instansi pemerintah, serta menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal, media cetak dan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan social learning theory, munculnya peledakan bom gereja Oikumene disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari masyarakat Sengkotek yang memiliki sikap yang terbuka dan perilaku toleransi yang tinggi terhadap pendatang dikarenakan kondisi budaya heterogen etnis yang tinggi. Lingkungan pemicu konteks juga diakibatkan oleh UU No.015/2003 yang mengatur tindak penangkapan terhadap perilaku terorisme. Sehingga pemerintah masih memiliki kendala-kendala yang cukup tinggi dalam memanajemen identitas ethnopolitical terutama dalam jangka panjang.

Kata Kunci : identitas, ethnopolitik, bom gereja Oikumene, UU No.15/2003.

Rahmah Daniah dan Frisca Alexandra

*Ethnopolitical Identity Management Of Indonesia (Case Study: Oikumene Church Bomb, Samarinda)*

*Although the Indonesian government feels that they had passed through the emergency phase of terrorism but it does not mean that the conditions is completely free from the threat of terrorism itself, it shows when the unpredictable terrorism act in East Borneo happened amongs the condition of a very diverse society with a quite ideal level of comfort and security. In November 2016, bomb threats occurred where the bomb blew up the Oikumene Church, the explosion also caused casualties. That action was carried out by a former convicted book terrorist in Tangerang who received prisoner remission. This research aims to explain the ethnopolitical identity management approach of the Indonesian government after Oikumene Church bombed in Samarinda, with a focus on government approaches through the short and long term. This research is a qualitative research using primary data obtained through in-depth interviews, especially on the concerned parties and documents study from government agencies and also using secondary data which is from books, journals, print and electronic media. The result of this research show that in accordance with Social Learning Theory, the emergence of Oikumene Church bombed was caused by the lack of attention and supervision from the Sengkotek society who have open attitude and high tolerance behaviour towards the immigrants due to high ethnic heterogeneous cultural condition. The context-triggering environment is also caused by UU No.015/2003 governing acts of arrest against terrorist behaviour. So the government still has quite high constraints in managing ethnopolitical identity, especially in the long term.*

*Keyword : identity, ethnopolitic, Oikumene Church bombed, UU No.015/2003.*



Kata Kunci bersumber dari artikel  
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Aryojati Ardipandanto

### **Kekuatan Dan Kelemahan Politik Jokowi Dalam Menghadapi Pilpres 2019**

Menjelang Pilpres 2019, beberapa survey menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Survey mengenai kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi selama menjadi Presiden RI adalah relatif seimbang. Beberapa kalangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil meraih kemajuan-kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sementara pihak lain berpandangan sebaliknya. Tulisan ini mengkaji kekuatan dan kelemahan politik Jokowi dalam konteks menghadapi Pilpres 2019. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisa deskriptif. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa kekuatan politik Jokowi terutama terletak pada aspek political image sebagai pemimpin yang merakyat, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, positioning prestasi sebagai Presiden RI secara nasional dan internasional, positioning dalam kehidupan ke-Islam-an nasional, dan dukungan prestasi beberapa Menteri Kabinet Kerja secara nasional dan internasional. Adapun kelemahan politik Jokowi terutama terletak pada belum terpenuhinya beberapa janji kampanye pada Pilpres 2014. Kelemahan politik yang paling utama Jokowi adalah dalam bidang perekonomian yang belum memenuhi target pencapaian sebagaimana yang dijanjikan.

Kata Kunci: Jokowi, Presiden Jokowi, Pilpres 2019, Kekuatan Politik, Kelemahan Politik.

Aryojati Ardipandanto

### *Jokowi's Political Strengths and Weaknesses in Facing Presidential Election 2019*

*Coming close to Presidential 2019, some surveys show that candidates Jokowi-Ma'ruf gain electability higher than candidates Prabowo-Sandiaga. Satisfaction survey on Jokowi works as Presiden of Republic of Indonesia show relatively balance opinion of satisfied and not satisfied. Some people give opinion that Presiden Jokowi has been succeed in achieving progressions in the development and people welfare enhancing programs, but anothers give opinion that Presiden Jokowi has failed on those. This paper analyse the political powers and weaknesses of Jokowi in the moment of facing Presidential Election 2019. The methodology used is qualitative with descriptive analysis technique. This paper reveal that the main Jokowi's political power is his political image as a populist and humble Leader. His another political powers are the success of infrastructure development, performances positioning as President of Republic of Indonesia nationally and internationally, positioning in Islam life nationally, and momentum support of some of his Ministers performances both nationally and internationally. Jokowi political weaknesses is mainly on some programmes that Jokowi has not fulfilled yet based on his promises in the campaign of Presidential Election 2014. But Jokowi's most mainly political weaknesses is in the economics program, which has not been yet succeed in gaining the economics growth target.*

*Keywords: Jokowi, President Jokowi, Presidensial Election 2019, Political Powers, Political Weaknesses.*